

Pers, Politik dan Demokrasi

PADA 9 Februari 2020, Pers Indonesia tepat berusia 74 tahun. Bertepatan dengan lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang didirikan 9 Februari 1946 di Solo. Memasuki usia 74 tahun, tentu menjadi catatan perjalanan yang sangat panjang, terutama dalam menjalankan peran menjadi "mata" dan "telinga" bagi publik yang memerlukan berbagai jenis informasi berdasarkan fakta.

Pasang surut perjalanan waktu, pers di Indonesia hadir dalam berbagai babakan kehidupan politik dan demokrasi. Paradigma pers Indonesia mengalami perubahan, seiring dengan bergantinya periode kekuasaan, dalam iklim politik dan demokrasi yang terus bergerak dinamis mengikuti alur perubahan zaman. Masa penuh tekanan rezim otoriter, pembonsaian, era bebas bertanggungjawab penuh kontrol (regulatif), hingga era kebebasan seperti kuda lepas dari kendangannya sekarang ini.

Tetapi apapun itu, perubahan masa tak boleh menggerus esensi peran pers sebagai *the fourth estate* (pilar demokrasi keempat), walaupun di tengah berbagai kekhawatiran publik di era sekarang ini, di mana pers dengan

budaya konglomerasinya seringkali mengedepankan kepentingan politik dan ekonominya (*political economy of media*) seperti yang ditegaskan Vincent Moscow (komodifikasi, strukturasi dan spasialisasi), ketimbang kepentingan publik. Tanda-tandanya jelas: kepemilikan media bersekutu dengan kepentingan politik. Bahkan banyak pemilik media, juga menjadi ketua umum partai politik (parpol), atau terjun ke dunia politik menjadi politisi.

Tantangan yang tak kalah menarik, adalah berubahnya budaya dan proses produksi informasi media, dari era konvensional (mainstream) ke era digital. Sebagai akibat dari pesatnya kemajuan teknologi serta berubahnya *habit* publik (generasi X, Y, Z bahkan generasi Alpha) dalam mengonsumsi informasi dengan menggunakan kecanggihan teknologi *smartphone*.

Hal itu, menuntut kerja-kerja jurnalistik harus berevolusi sebagai akibat dari pesatnya perkembangan teknologi informasi yang berbasis digital. Pers dituntut bekerja lebih cepat, lebih praktis, bahkan dianggap lebih mudah dengan bantuan teknologi

itu. Kondisi ini jika dipahami secara teknis mungkin iya, karena zaman memang telah berubah dengan cepat. Tapi pada konteks ideologis dan filosofis, mungkin perlu perenungan yang lebih mendalam, agar marwah pers Indonesia kembali menemukan alur yang diinginkan publik.

Lalu apa harapan kita terhadap peran dan fungsi pers saat ini? Apalagi kehadiran pers sebagai pengawal politik dan demokrasi yang semakin nyaman berada dalam jebakan kuasa modal dan komersialisasi. Pasca reformasi 1998, pers memang kembali memperoleh kebebasannya, tetapi kebebasan itu juga diyakini banyak pihak mulai menggerus idealisme dan cita-cita luhur pers sebagai "mata" dan "telinga" bagi ruang publik dalam berbagai konteks.

Ibarat sebuah perjalanan, pers Indonesia telah melewati perjalanan panjang yang penuh rintangan, hadangan dan beragam tantangan, bahkan cobaan. Apalagi jika substansi perjalanan panjang itu dihubungkan dengan kuatnya arus politik dan dinamika demokrasi yang menyerupa dan membekap tubuh pers Indonesia. Pers senantiasa dituntut

Oleh:
Dr. Hendra Alfani
(Dosen FISIP UNBARA dan
Direktur Lingkar Prakarsa
Institute)



berhati-hati dalam segala bentuk aktivitasnya, manakala rezim yang berkuasa beralih serta berganti sesuai dengan arus perubahan politik dan dinamika demokrasi yang kerap menghadirkan berbagai lakon yang kontroversial.

Dinamika pers Indonesia terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, di mana dalam perkembangan itu, situasi dan perubahan politik kekuasaan dan kekuatan-kekuatan ekonomi telah menyebabkan pers berubah men-

jadi kekuatan industri yang menjadi bagian dari kapitalisme global. Pers, yang seharusnya dapat disebut sebagai cermin yang menggambarkan keadaan masyarakatnya, mulai mengalami pergeseran, bahkan terjebak dalam perangkap gurita kapitalisme global.

Oleh karena itu, melihat dinamika pers Indonesia harus diletakkan dalam totalitas sosial yang lebih luas, sebagai bagian integral dari proses-proses ekonomi, sosial, dan politik yang berlangsung dan berkembang dalam masyarakat. Institusi pers, struktur industri media, dan interaksi antara pers dan berbagai kelompok yang memproduksi dan mengonsumsi teks isi media, merupakan bagian dari proses dinamika politik, ekonomi, dan sosial masyarakat yang mesti dicermati secara seksama.

Akan tetapi, jalan panjang pers Indonesia di tengah arus politik dan demokrasi yang terus bergerak dinamis itu, menurut saya dapat terus konsisten menjaga marwahnya ketika ia berpegang teguh dan berpijak pada prinsip-prinsip kebebasan pers seperti yang diungkapkan oleh Bagir Manan (2018), dan sepuluh elemen jurnalisme yang dikemukakan oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstiel (2001).

Pijakan pertama, menurut

Bagir Manan (2018), adalah bahwa kemerdekaan atau kebebasan pers bukan sekedar hak, baik dalam makna *human rights, fundamental rights, legal rights* atau *constitutional rights*. Kemerdekaan atau kebebasan pers selain sebagai hak sekaligus sebagai kebutuhan. Kebutuhan peradaban. Artinya apa? Pers memang harus berpihak, tetapi keberpihakan yang paling tepat adalah berpihak pada keadilan dan berpihak kepada yang benar.

Lalu pijakan kedua, adalah sepuluh elemen jurnalisme yang dikemukakan oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstiel (2001), bahwa, pertama, tugas utama praktisi jurnalisme adalah memberitakan kebenaran. Kebenaran yang dimaksud bukan perdebatan filsafat atau agama, tapi kebenaran fungsional yang sehari-hari diperlukan masyarakat. Kedua, loyalitas utama wartawan pada masyarakat, bukan pada perusahaan tempatnya bekerja, pembaca, atau pengiklan. Wartawan harus berpihak pada kepentingan umum. Ketiga, esensi jurnalisme adalah verifikasi, memastikan bahwa data dan fakta yang digunakan sebagai dasar penulisan bukan fiksi, bukan khayalan, tetapi berdasarkan fakta dan pernyataan narasumber di lapangan. Keempat, wartawan harus

independen, artinya tak masalah untuk menulis apapun (baik/buruk) tentang seseorang sepanjang sesuai dengan temuan/fakta yang dimilikinya. Independensi harus dijunjung tinggi di atas identitas lain seorang wartawan.

Kelima, jurnalisme harus memantau kekuasaan, menyambung lidah yang tertindas. Ada tiga macam liputan investigasi: investigasi orisinal, *investigation on investigation, interpretative investigation*. Keenam, jurnalisme sebagai forum publik, bukan sebuah ruang privat bagi penulis. Penulis harus bertanggungjawab atas liputan yang dibuatnya. Partisipasi publik melalui komentar dan tanggapan merupakan bagian yang melekat dari proses jurnalisme. Ketujuh, jurnalisme harus memikat dan relevan. Ada adalah keterampilan penting yang harus dimiliki oleh wartawan. Mereka tak hanya membuat artikel yang memikat pembaca karena sensasional, tetapi bisa menyajikan artikel penting dan relevan dengan cara yang menarik bagi pembaca.

Kedelapan, berita harus proporsional dan komprehensif. Pemilihan berita sangat subjektif. Justru karena subjektif wartawan harus ingat agar proporsional dalam menyajikan berita. Ibarat sebuah peta, ada detail suatu blok, tapi juga gambaran lengkap sebuah kota. Kesembilan, mendengarkan hati nurani. Karena *deadline*, harus ada seseorang di puncak organisasi berita yang mengambil keputusan redaksional. Editor harus bertanggungjawab terhadap produk *newstroom*, tapi pintu diskusi harus senantiasa terbuka. Dan, kesepuluh, hak dan kewajiban terhadap berita. Kita sedang berada dalam revolusi komunikasi. Jurnalisme bukan sekedar informasi. Demokrasi dan jurnalisme lahir bersama-sama dan mereka juga akan jatuh bersama-sama.

Semoga marwah kebebasan Pers Indonesia senantiasa terjaga dengan pijakan berpihak pada keadilan dan berpihak kepada yang benar: (selalu) menyampaikan kebenaran. Dirgahayu Pers Indonesia ke 74, selamat menghadapi zaman yang terus berubah. (*)

Nusa Tour & Travel

BEST
SELLER

HONG KONG
Disneyland
香港迪士尼樂園



KEHILANGAN

Telah Hilang Satu Lembar BPKB Mobil Merk SUZUKI
Dengan Nopol BG 9166 FA
Nomor Rangka : MHYESL415EJ-319447
Nomor Mesin : G15AID956555
Atas Nama Jadi Saputro
Alamat : Ds. Karya Jaya RT/RW 009/003
Kecamatan Sinar Peninjauan - OKU

PURI RAJA
KAPURAN
Hunian yang Nyaman

Rumah Subsidi

DP 5
800 Ribuan

DHIEA RUYUH